

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa pengaruh terhadap kegiatan bisnis. Selain itu, banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan seperti penyalahgunaan kekuasaan, KKN, serta manipulasi laporan keuangan. Manajemen harus mampu mengembangkan dan menerapkan sistem serta strategi dan juga kebijakan yang ditetapkan perusahaan terutama dalam bidang tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance*.

Isu mengenai *Good Corporate Governance* saat ini masih menjadi bahan perbincangan dikalangan ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia. Masalah *Good Corporate Governance* semakin menjadi perhatian besar di Asia sejak terjadinya krisis finansial pada pertengahan tahun 1997 yang dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (Hamdani, 2016). Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi harapan, oleh karena itu penerapan GCG memerlukan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Sehingga tidak heran bahwa kini perusahaan berlomba-lomba meningkatkan daya saingnya di berbagai bidang dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Namun baru sebatas pada tuntutan regulasi, sementara aspek operasional prinsip-prinsip GCG belum sepenuhnya terintegrasi.¹

¹ Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.1.

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam (Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana, 2009)“ **A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled**”. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.²

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti Good Corporate Governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³

Kinerja perusahaan menggambarkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Kinerja yang baik, stabil dan cenderung meningkat menjadi tujuan yang selalu ingin dicapai oleh setiap perusahaan agar menjadi senantiasa disenangi oleh para investor. Umumnya, kinerja suatu perusahaan digambarkan melalui kondisi keuangan.

² Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, **Etika Bisnis Dan Profesi**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 101.

³ Sedarmayanti, **Good Corporate Governance: Pemerintahan Yang Baik & Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** (Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2015), hal.37.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu. Hal tersebut juga berguna sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

Tingkat profitabilitas perusahaan yang menurun mengindikasikan perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak baik serta menunjukkan perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Maka dari itu perusahaan perlu melakukan penelitian atas profit mereka untuk dijadikan acuan perencanaan laba ke depan dan membuat para investor percaya akan investasinya.

Profitabilitas menurut (Amran Manurung & Halomoan Sihombing, 2017) adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Disini permasalahannya adalah keefektifan manajemen dalam menggunakan baik total aktiva maupun aktiva bersih. Keefektifan dinilai dengan mengaitkan laba bersih terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba.⁴

Apabila dilihat dari tujuan perusahaan bahwa tujuan akhir yang ingin diraih suatu perusahaan yang paling utama adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal disamping hal-hal lainnya, maka dari itu perusahaan harus melakukan analisis rasio profitabilitas dimana analisis tersebut akan menilai sejauh mana perusahaan dalam memperoleh laba. Salah satu alat analisis rasio profitabilitas adalah ROE (*Return on Equity*).

⁴Amran Manurung dan Halomoan Sihombing. **Analisis Laporan Keuangan**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal.10.

Menurut (Kasmir, 2012) *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Bisa diartikan bahwa ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dana yang diinvestasikan oleh investor.⁵

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas salah satunya adalah *Good Corporate Governance*. Proksi yang digunakan untuk mengukur *Good Corporate Governance* yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Dewan direksi adalah pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan komisaris sebagai pengawas dalam suatu perusahaan sedangkan komisaris independen sebagai kekuatan penyeimbang keputusan dari dewan komisaris. Peranan dewan komisaris dan komisaris independen sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* tersebut. Sedangkan komite audit bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan (Tangguh Wicksono, 2014).

Good Corporate Governance merupakan jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori agensi dalam tataran empirik. *Good Corporate Governance* diharapkan tidak hanya fokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga stakeholders, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan tersebut sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

⁵Kasmir. **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi ke-V : Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.113.

Salah satu yang mampu meningkatkan profitabilitas dan mencegah adanya konflik kepentingan adalah *Good Corporate Governance* yang merupakan suatu konsep yang didasari dari teori keagenan, dengan harapan dapat meyakinkan pemilik (investor), bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari investasinya berupa return atas dana yang diinvestasikan.

Beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan Good Corporate Governance (GCG) dengan kinerja perusahaan dalam hal ini diukur dengan profitabilitas. Salah satunya adalah (Tangguh Wicksono, 2014) melakukan penelitian yang menghubungkan GCG dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan Variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap REO serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.⁶

Dan (Melanthon Rumapea, 2017) juga melakukan penelitian serupa yang menghubungkan *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan komisaris signifikan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan komite audit signifikan dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Secara simultan, dewan direksi,

⁶ Tangguh Wicaksono, "*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2012)*". **Semarang**, Kampus UNES, 17 September 2014, hal. 85.

dewan komisaris, dan komite audit signifikan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁷

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Jeli Makrifat, 2019), perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang dipusatkan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan jangka waktu pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu tahun 2017-2018.⁸

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Profitabilitas?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Profitabilitas?
3. Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Profitabilitas?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus sehingga hasil akhirnya tidak meyimpang dan juga karena keterbatasan pengalaman dari peneliti, maka pada objek penelitiannya perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini objek penelitian berfokus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2018.

⁷ Melanthon Rumapea, "Pengaruh GCG Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2017, hal.11.

⁸ Jeli Makrifat, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Alasan peneliti memilih perusahaan yang bergerak di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, karena perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup diminati oleh para investor. Meskipun pertumbuhan sektor industri barang konsumsi yang ada di Indonesia sempat mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir karena adanya persaingan antar perusahaan yang semakin ketat dan memanas yang melibatkan berbagai merek lokal maupun impor. Emiten sektor industri barang konsumsi yang sempat dipandang sebelah mata sebagian pihak beberapa waktu terakhir menunjukkan keperkasaannya pada kuarta III tahun 2018.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI), konsumsi masyarakat pada kuartal III tahun 2018 berada di kisaran lima persen secara tahunan. CNNIndonesia.com mencatat lima emiten terbesar di sektor barang konsumsi yang telah merilis laporan keuangannya pada kuarta III tahun 2018, antara lain PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR). Selain itu, secara tidak langsung, sektor industri barang konsumsi dapat mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumtif masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018

2. Untuk mengetahui apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018
3. Untuk mengetahui apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

2. Bagi Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan GCG sehingga dapat digunakan oleh para akademis dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi mengenai pengaruh GCG terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat digunakan oleh para praktisi dalam menjalankan praktik bisnisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Banyak jalan untuk memahami *Good Corporate Governance*, namun jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (*agency theory*) terlebih dahulu. Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal* (Hamdani, 2016).

Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976 (Hamdani, 2016).⁹ Teori agensi merupakan salah satu pilar dalam teori keuangan (*theory of finance*). Pilar lainnya adalah teori pasar yang efisien (*efficient market theory*), teori portofolio (*portfolio theory*), teori penetapan harga asset modal (*capital asset pricing theory*), dan teori struktur mikro (*micro structure theory*) (Adrian Sutedi, 2011). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual antar manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Pemilik perusahaan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja.¹⁰

Menurut (Hamdani, 2016) Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Dalam teori ini

⁹ Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.34-35.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.15.

dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*).¹¹

Konflik kepentingan antara pemilik dan agent terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan.¹²

Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimal nilai pemegang saham.

Yang menjadi pemicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*. Perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh *agent*, mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan lebih banyak yang disebut *agency cost*. Biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi:

¹¹ Hamdani, Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.30.

¹² Ibid., hal.30.

1. Monitoring Cost

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitoring perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi.

2. Bonding Cost

Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*.

3. Residual Loss

Residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.¹³

Oleh karena itu adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang saham, sehingga manajer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*). Hal ini dilakukan karena manajer menganggap ia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak dimiliki oleh *principal* (*asymmetric information*).

¹³Ibid., hal.31.

2.2. Teori Stakeholder

Istilah stakeholder pertama kali di perkenalkan oleh *Stanford research institute* (SRI) pada tahun 1963. *Stakeholder* didefinisikan sebagai **“any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective”**. Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.¹⁴

Tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada indikator ekonomi (*economics focused*) dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor social (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, sangat tergantung pada dukungan *stakeholder*. Makin *powerfull* dukungan *stakeholder*, makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan (Hamdani, 2016).

Menurut Galbreath (2006) dalam (Hamdani, 2016) membaginya kedalam dua kelompok yaitu *internal primary stakeholder* dan *external primary stakeholder*. Penelitian tersebut sekalian memberikan bukti bahwa tidak semua kelompok *stakeholders* utama berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun secara khusus tata kelola perusahaan dan manajemen karyawan secara positif dan signifikan berpengaruh kinerja.

Stakeholders termasuk di dalamnya pelanggan, pegawai eksekutif, karyawan, pemasok, pemegang saham, *environmental* (lingkungan) dan *concurrence*.

¹⁴ Ibid.,hal.34.

Diperlukan keselarasan diantara kelompok-kelompok ini agar tercipta situasi harmonis antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial perusahaan. *Corporate governance* mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk pencapaian *profit* dan *sustainability* secara seimbang. Pencapaian keuntungan tersebut merupakan wujud pemenuhan pemegang saham (*shareholder*) dan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian *sustainability* yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹⁵

2.3. Good Corporate Governance

2.3.1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Adrian Sutedi, 2011). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini: *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya; *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.¹⁶

Good Corporate Governance menurut Bank Dunia dalam (Hamdani, 2016) adalah aturan, standard dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham

¹⁵ Ibid., hal.37.

¹⁶ Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.34.

dan kreditor). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.¹⁷

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam (Hamdani, 2016) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*.¹⁸

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur suatu hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu, *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* karena secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut (Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana, 2009) ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance* yang hampir

¹⁷Ibid., hal.21.

¹⁸Ibid., hal.20.

samadikemukakan oleh NCG (*National Committee on Governance*), yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan yang setara (*fairness*) merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya).
2. Transparansi (disebut juga dengan prinsip keterbukaan) artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.
3. Akuntabilitas adalah para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
4. Responsibility (prinsip tanggung jawab) adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.
5. Kemandirian adalah sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan,

dan bebas dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.¹⁹

2.3.2. Struktur Good Corporate Governance

Struktur *good corporate governance* berkaitan dengan model sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Negara-negara yang menganut model hukum *Anglo-Saxon*, struktur *good corporate governance* tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi, model ini dikenal dengan *single board system*. Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika dan Negara-negara lain yang basis hukumnya menganut model *Anglo-Saxon*, struktur *good corporate governance* terdiri dari RUPS, *board of directors* (representasi dari pemegang saham) dan *executive managers* (merupakan pihak manajemen yang menjalankan aktivitas operasi perusahaan).²⁰

Bagi Negara-negara yang menganut Model *Continental Europe*, struktur *good corporate governance* disebut dengan *two board system* yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Manajer Eksekutif (selaku pihak manajemen). Dalam *two board system* secara tegas adanya pemisahan keanggotaan dewan yaitu keanggotaan Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi selaku pihak yang mengelola perusahaan (eksekutif). RUPS adalah struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan

¹⁹Ibid., hal .104.

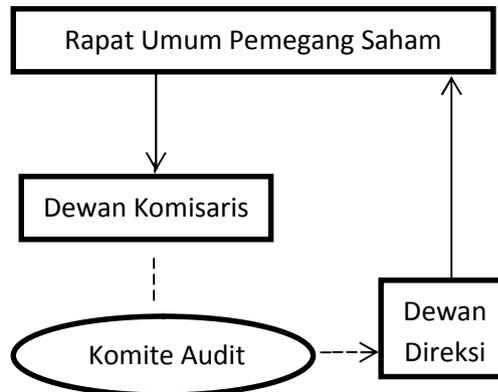
²⁰Ibid., hal.118.

Direksi serta melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi dalam anggota perusahaan.²¹

Di Indonesia, struktur *corporate governance* diatur dalam UU PT no.40 tahun 2007. Menurut para ahli system *good corporate governance* yang dianut Indonesia mengikuti pola *Continental European System* atau disebut dengan *two board system* yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Manajer Eksekutif (selaku pihak manajemen). Perbedaan mendasar terletak pada kedudukan Dewan Komisaris yang tidak langsung membawahi direksi. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU PT no.40 tahun 2007 bahwa anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 94 ayat 1 dan pasal 105 ayat 1). Kedudukan anggota Dewan Komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 111 ayat 1). Dengan demikian, maka baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris bertanggung jawab pada RUPS. Struktur *good corporate governance* yang menempatkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sejajar berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengawasan karena Dewan Direksi bertanggung sebagai mitra kerja.²²

²¹Ibid., hal.119.

²²Ibid., hal.120.



Gambar 1. Struktur *Dual Board* system yang berlaku di Indonesia

2.3.3. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara para pelaku dalam suatu perusahaan ketika menjalankan peran dan tugasnya.

Struktur memiliki peranan yang penting dalam implementasi mekanisme *Good Corporate Governance*. Struktur berperan dalam sebagai kerangka dasar tempat diletakkannya system dalam penyusunan mekanisme *Good Corporate Governance*. Struktur *Good Corporate Governance* merupakan kerangka dasar management perusahaan dalam pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS/pemegang saham).

2.3.4. Ukuran Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan tertentu (Adrian Sutedi, 2011). Secara yuridis, pentingnya kedudukan direksi itu tergambar dari tugas dan

tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan direksi merupakan pihak dari suatu entitas perusahaan yang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS (Tangguh Wicksono, 2014). Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan.

2.3.5. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Pemahaman tentang dewan komisaris juga dapat ditemui dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris.

Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris bertujuan agar pihak management dapat berkerja dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.3.6. Ukuran Komite Audit

Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membentuk fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

Munculnya Komite Audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal peyelewengan dan kelalaian oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun di Indonesia yang menandakan memadainya fungsi pengawasan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati dalam (Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana, 2009) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).²³

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.²⁴

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit (Adrian Sutedi, 2011).

2.4.Profitabilitas

2.4.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menurut (Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, 2015)“**merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi**”.²⁵ Artinya, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki

²³Ibid., hal.111.

²⁴ Ibid., hal.89

²⁵Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan.**Manajemen Keuangan; Teori dan Aplikasi**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, 2015, hal.99.

investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2012). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang dilaporkan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukurannya dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat sejauh mana perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio yang digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut (Kasmir, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Profit Margin
2. ROI (*Return on Investment*/Hasil Pengembalian Investasi)
3. ROE (*Return on Equity* / Hasil Pengembalian Ekuitas)
4. Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning Per Share of Common Stock)

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan salah satu dari jenis-jenis rasio yang ada yaitu rasio *Return on Equity* (ROE).

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan (Kasmir, 2012), yaitu:²⁶

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;

²⁶Ibid., hal. 197.

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan labar dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik yang dipinjam maupun modal sendiri.

2.4.3. ROE (*Return on Equity*/ Hasil Pengembalian Ekuitas)

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (Kasmir, 2012). Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pulak sebaliknya.²⁷

²⁷Ibid., hal. 204.

Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equitas}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2012)

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh praktik GCG terhadap kinerja suatu perusahaan. Peneliti-peneliti tersebut diantaranya sebagai berikut :

Framudyo Jati (2009) menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variable independen dalam penelitian ini adalah struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, dan keberadaan komite audit. Variabel independennya adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang diukur adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.

Iqbal Bukhori (2012) meneliti pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Variabel yang diuji adalah ukuran dewan komisaris, dewan direksi sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan

CFROA. Pengumpulan data menggunakan metode *random sampling* terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 sebanyak 160 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Nugroho (2014) menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan karakteristik *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh 77 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pengungkapan CSR, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit suatu perusahaan, semakin tinggi kinerja perusahaan.

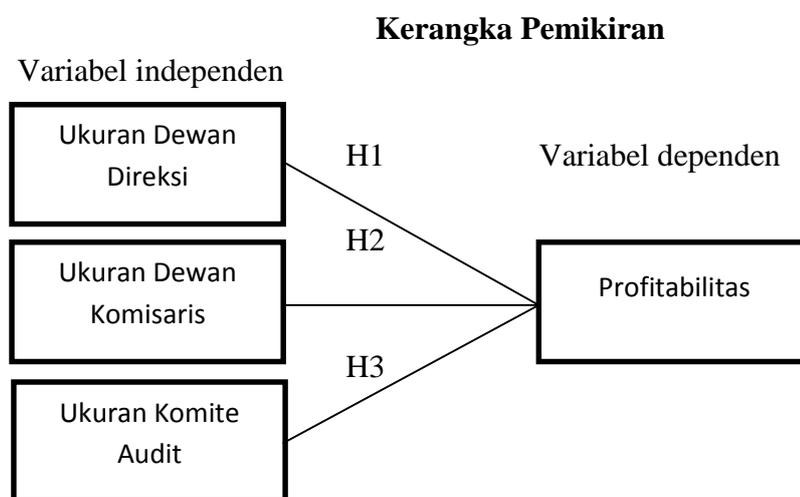
Tangguh Wicaksono (2014) menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan. GCG dalam hal ini diproksi dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Sedangkan

variabel depend dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan *return on equity* (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE, serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian ini adalah GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Melanthon Rumapea (2016) menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Sedangkan, rasio profitabilitas diproksikan dengan *return on equity* (ROE). Sampel penelitian yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keuangan masing-masing perusahaan sampel yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur dimana *good corporate governance* yang terdiri dari dewan direksi signifikan dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dewan komisaris signifikan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, serta komite audit signifikan dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Secara simultan, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit signifikan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan gambar di atas, maka dalam penelitian ini variabel independen *good corporate governance* akan diuji pengaruhnya terhadap variabel variabel dependen profitabilitas. Pada penelitian ini, *good corporate governance* dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.7. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.7.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Pemisahan peran dewan direksi dengan dewan komisaris membuat dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dijelaskan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena dengan adanya beberapa anggota dewan direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara dewan direksi dengan dewan komisaris.

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian sebelumnya yaitu (Tangguh Wicksono, 2014) pada hasil penelitiannya diketahui bahwa variabel

dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE sedangkan (Melanthon Rumapea, 2017) pada hasil penelitiannya diketahui bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan. Maka bukti yang diperlukan masih diperbincangkan (Iqbal Bukhori, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam menilai peran ukuran dewan direksi terhadap profitabilitas perusahaan.

H1 = Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

2.7.2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Menurut Iqbal bukhor (2012) dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi jauh lebih banyak. Dari peneliti sebelumnya yaitu (Melanthon Rumapea, 2017) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian selanjutnya adalah :

H2 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

2.7.3. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki kekuasaan langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam memperantarai kepentingan *principal* dalam suatu perusahaan.

Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketua oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Peran Komite Audit yang sangat penting ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan peningkatan kinerja perusahaan maka diharapkan profitabilitas perusahaan dapat meningkat.

Dari hasil penelitian (Tangguh Wicksono, 2014) menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya adalah :

H3 = Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang diukur melalui ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan komite audit, sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas perusahaan.

3.1.1. Variabel Dependen

Menurut (Jadongan Sijabat, 2014)“**Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen**”.²⁸Variabel dependen (terikat) penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan. Besarnya profit perusahaan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Apabila investor ingin melihat seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan *return* atas investasi yang mereka tanamkan, pertama kali yang akan dilihat oleh *stakeholder* adalah rasio profitabilitas terutama *Return on Equity* (ROE) yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan *return* bagi para investor.

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (Kasmir, 2012).

$$\text{Return on Equity ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

3.1.2. Variabel Independen

²⁸ibid., hal. 43.

Manurut (Jadongan Sijabat, 2014)“**Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain**”.²⁹Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam (Sedarmayanti, 2015) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

3.1.2.1. Ukuran Dewan Direksi

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pearce & Zahra,1992 dalam Melanthon Rumapea, 2017). Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah seluruh anggota dewan direksi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah anggota Dewan Direksi

3.1.2.2. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan perbandingan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Ukuran dewan komisaris diukur dengan membagi antara total anggota dewan komisaris dibandingkan dengan total anggota dewan direksi di perusahaan. Rumus untuk menghitung ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut:

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah anggota Dewan Komisaris

3.1.2.3. Ukuran Komite Audit

²⁹ibid., hal. 43.

Ukuran komite audit adalah salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran komite audit diukur dengan membandingkan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung ukuran komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah anggota Komite Audit}$$

Tabel 3.1
Identifikasi dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala	Rumus
Ukuran Dewan Direksi	Jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan.	Rasio	Jumlah anggota dewan direksi
Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari luar maupun eksternal.	Rasio	Jumlah anggota dewan komisaris
Ukuran Komite Audit	Jumlah keseluruhan anggota komite audit dalam perusahaan.	Rasio	Jumlah anggota komite audit
Profitabilitas	Besarnya profit perusahaan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kinerja perusahaan. ROE adalah salah satu rasio yang mengukur kinerja perusahaan.	Rasio	$\text{Return on Equity ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equitas}} \times 100\%$

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi digunakan apabila subjek yang akan diteliti jumlahnya terbatas. Misalnya jika seorang eksekutif puncak sebuah bank ingin mengetahui strategi-strategi pemasaran yang dilakukan semua bank di Jakarta, maka bank yang ada di Jakarta merupakan populasi. Jika populasi tidak didefinisikan dengan baik, maka kesimpulan yang dihasilkan dari suatu penelitian kemungkinan akan keliru. Dengan kata lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2018).³⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2018 berjumlah 48 perusahaan.

3.2.2. Sampel

Sampel penelitian merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian (Sudaryono, 2018).³¹

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan data tentang *corporate governance* khususnya yang memuat informasi tentang ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Selain itu juga mempublikasikan data keuangan yang lengkap pada tahun 2017 dan 2018.
2. Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif. Hal ini karena ROE (*Return on Equity*) sebagai proksi dari kinerja perusahaan yang menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 desember 2017 dan 31 Desember 2018, serta menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini secara lengkap.

³⁰Sudaryono. **Metodologi Penelitian**. Cetakan Kedua: Rajawali Pers, Depok, 2018. hal.166

³¹ibid., hal. 167.

Tabel 3.2
Proses Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria	Total
Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan data tentang <i>Corporate Governance</i> khususnya yang memuat informasi tentang ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Selain itu juga mempublikasikan data keuangan yang lengkap pada tahun 2017 dan 2018.	37
Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas yang positif. Hal ini karena ROE (<i>Return on Equity</i>) sebagai proksi dari kinerja perusahaan yang menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas.	37
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018, serta yang tidak menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini secara lengkap.	11
Perusahaan yang Delisting dari Bursa Efek Indonesia	2
Jumlah Sampel Penelitian	35

Sumber: www.idx.co.id (data telah diolah kembali)

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas, maka perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel penelitian berjumlah 35 perusahaan, diantaranya :

Tabel 3.3.
Daftar Nama Perusahaan Sampel

No	Nama Perusahaan
1	PT Tri Baryan Tirta Tbk
2	PT Campina Ice Cream Industri Tbk
3	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
4	PT Sariguna Primatirta Tbk

5	PT Delta Djakarta Tbk
6	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
7	PT Inti Agri Resources Tbk
8	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
9	PT Multi Bintang Indah Indonesia Tbk
10	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
11	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk
12	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
13	PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk
14	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
15	PT Gudang Garam Tbk
16	PT Hanjaya Mandala Sempoerna Tbk
17	PT Bentoel Internasional Investama + D24 Tbk
18	PT Wismilak Inti Makmur Tbk
19	PT Darya Varia Laboratoria Tbk
20	PT Indofarma Tbk
21	PT Kimia Farma Tbk
22	PT Kalbe Farma Tbk
23	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
24	PT Tempo Scan Pacific Tbk
25	PT Akasha Wira Internasional Tbk
26	PT Kino Indonsia Tbk
27	PT Martina Berto Tbk
28	PT Mustika Ratu Tbk
29	PT Mandom Indonesia Tbk
30	PT Unilever Indonesia Tbk
31	PT Chitose Internasional Tbk
32	PT Kedaung Indah Can Tbk
33	PT Langgeng Makmur Indsutri Tbk
34	PT Integra Indocabinet Tbk
35	PT Hartadinata Abadi Tbk

Data diolah kembali dari www.sahamok.com

Kenapa 35 perusahaan, karena ada 2 perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia yaitu PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk dan PT Sekar Bumi Tbk. Selanjutnya 9 perusahaan lainnya, sudah mengkonfirmasi kepada BEI bahwa mereka terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan dikarenakan adanya kendala transisi dari manajemen lama ke manajemen baru yang saat ini dinilai belum proper. Maka sampel penelitian ini terdiri atas 70 sampel yang akan diuji selama tahun 2017-2018.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Adapun data yang berbentuk kuantitatif yaitu data yang hasilnya berbentuk angka-angka. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber diantaranya yaitu dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didokumentasikan dalam website www.idx.co.id.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka yaitu melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku-buku, jurnal, majalah dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dengan cara mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif. Menurut Siregar dalam (Resti Amini, 2015) **analisis deskriptif merupakan bentuk**

analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan sampel. Hasil penelitiannya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak.

Data profitabilitas menggunakan perhitungan *Return on Equity* (ROE) juga diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang dipublikasikan di website resmi BEI. Perhitungan ROE adalah:

$$\text{Return on Equity ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equitas}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2012)

Hasil dari pengolahan data tersebut kemudian dilakukan pengujian apakah penerapan ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROE.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan ada empat yaitu uji normalitas, uji multikoloneritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang terdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006, dalam Wicaksono 2012). Pengujian normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

HA : data residual tidak berdistribusi normal

Level signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,05. Data terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) hasil perhitungan dalam computer lebih besar dari 0,05.

3.5.2.2.Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali,2006). Multikolonieritas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di anatar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolonieritas di dalam model regresi, maka perlu dilihat bebrapa kriteria sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0.95), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
3. Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance 0.10 atau sama dengan VIF 10 (Ghozali,2006, dalam Wicaksono, 2012).

3.5.2.3.Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali,2006, dalam Wicaksono, 2012). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test)

yang mensyaratkan adanya konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lagi di antara variabel independen (Ghozali, 2006, dalam Wicaksono, 2012).

Mekanisme pengujian Durbin-Watson menurut Gujarti 2002 dalam Wicaksono. 2016) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

2. Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson)

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, menentukan nilai batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L) dalam table.

4. Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $0 < d < d_L$, H_0 ditolak berarti terdapat autokorelasi positif

b. Jika $d_L \leq d \leq d_U$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.

c. Jika $d_U < d < 4 - d_L$, H_0 tidak ditolak berarti tidak ada autokorelasi

d. Jika $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.

e. Jika $4 - d_L < d < 4$, H_0 ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.

3.5.2.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006, dalam Wicaksono, 2012). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas (homokedastisitas) dimana *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Ada

beberapa cara untuk menguji heterokedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006, dalam Wicaksono, 2012).

3.5.3. Pengujian Hipotesis

Guna melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Adapun persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Model regresi :

$$\text{ROE} = \alpha + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{DK} + \beta_3 \text{KA} + e$$

ROE : Kinerja perusahaan tahun I tahun ke- t yang diukur menggunakan

ROE

: Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

DD : Ukuran Dewan Direksi perusahaan i tahun ke- t

DK : Ukuran Dewan Komisaris perusahaan i tahun ke- t

KA : Ukuran Komite Audit perusahaan I tahun ke- t

e : error

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi klasik maka langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis ini meliputi:

3.5.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistika t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006, dalam Tangguh Wicaksono, 2012). Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:

1. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05.
2. Menghitung nilai *sig-t* dengan menggunakan software SPSS 22
3. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu bila nilai signifikan kurang dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan bila nilai signifikan lebih dari 0,05 variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai *Adjusted* R^2 lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

